

Pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Intan Permata Putri¹ Lilis Suriani²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
intanpermataputri@student.uir.ac.id lilissuriani@soc.uir.ac.id

Received : May 3, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

Children are a trust and a gift from God Almighty, who must always be looked after because within them are inherent honor, dignity and rights as human beings which must be upheld. Special protection for children is a form of protection received by children in certain situations and conditions to guarantee a sense of security against threats that endanger themselves and their lives in their growth and development. Therefore, this research aims to analyze and explain the implementation of special child protection in the women's empowerment service, child protection and community empowerment in the city of Pekanbaru. This type of research uses qualitative methods using data collection techniques through observations, interviews and documentation. This research uses implementation theory which has 6 dimensions of research. The results of this research indicate that there is a lack of optimal implementation of special protection for children. This is caused by several obstacles, namely the lack of availability of human resources, the lack of male human resources because they are needed for the purposes of caring for male victims, the lack of facilities and infrastructure in the process of implementing special child protection, and limited budgets.

Keywords: *Implementation, Program, Special Protection for Children*

Abstrak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan khusus anak merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan tentang penyelenggaraan perlindungan khusus anak di dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Pekanbaru. Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan yang memiliki 6 dimensi penilaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya optimalnya penyelenggaraan perlindungan khusus anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu kurangnya ketersediaan sumber daya manusia kurangnya sumberdaya manusia yang berjenis kelamin laki laki karna dibutuhkannya untuk keperluan penanganan korban yang berjenis kelamin laki laki, kurang tersedianya sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan perlindungan khusus anak, dan terbatasnya anggaran.

Kata kunci: *Pelaksanaan, Program, Perlindungan Khusus Anak*

Pendahuluan

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan khusus anak merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya," demikian ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 nomor 2 PP. Perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak. Peraturan ini merupakan mandat dari pasal 71C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 merupakan affirmative action yang bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Dalam PP 78 Tahun 2021 pada pasal 3 menyebutkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Kemudian, dengan mengkombinasikan dua kata tersebut ke dalam bahasa Inggris, lahirlah kata *administer* dan kata bendanya *administration*. Kata "ad" pada awal kata *minister* berarti membantu atau menambah (Dimock & Demock, 1998:21). Di dalam bahasa Inggris-Indonesia oleh John M. Echol dalam Hasan Shadly (1992:1) to manage artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, 2) to conduct artinya memimpin dan mengadakan, 3) to direct artinya menunjukkan serta mengatur.

Konsep Organisasi

Organisasi menurut Robbins (1990:4) Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Mooney (Syafiie, 2010: 51) Organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan bersama. Kemudian menurut Millet

(Syafiie, 2010: 51) Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Konsep Manajemen

Menurut Terry (Syafiie, 2010: 49) Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Menurut Atmosudirjo (Syafiie, 2010: 49) Manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu.

Konsep Kebijakan Publik

Menurut Dye (Syafiie, 2010: 105), kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do).

Menurut Chandler dan Plano (Syafiie, 2010: 105), kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Konsep Implementasi

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut..

Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut (Wesra, 2011) adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alata-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksananakn, dimana tempat dan kapan waktu pelaksanaannya.

Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasioanl atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan semula. (Abdullah, 2014).

Konsep Program

Program merupakan bagian dari perencanaan,. Secara umum program diartikan sebagai penjabaran dari suatu perencanaan. Program sering pula diartikan sebagai suatu kerangka dasar dari pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan. (Tachjan, 2006:35).

Menurut Hunger, J David & Whelen, Thomas L (2012:27) mengatakan program adalah pernyataan aktivitas atau langkah langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai.

Perlindungan Khusus Anak

Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Metode

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini berupaya menganalisis dan menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan faktanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah "Pelaksanaan Dalam Program Perlindungan Khusus Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru". Metode Kualitatif menurut Johnny Saldana (2011) dalam (Sugiyono, 2020) merupakan payungnya semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural/alamiah.

Hasil dan Pembahasan

1. Standard dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan, pada dasarnya adalah apa yang dikehendaki dan dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara menyeluruh sehingga dilakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

a. Mampu menurunkan angka kekerasan pada Anak

Berdasarkan hasil survey lapangan, peneliti mengamati bahwasanya tingkat kekerasan pada anak masih ada akan tetapi tidak terlalu signifikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Dina Septiana, S.STP,M.Si Selenggarakan Dilnas Pembelajaran Perempuan Perlindungan Anak Dan Pembelajaran Masyarakat Kota Pekanbaru 21 Februari 2024, beliau mengatakan sebagai berikut :

“kekerasan pada anak di kota pekanbaru memang masih ada akan tetapi tidak terlalu banyak maka dari itu adanya program perlindungan khusus anak adalah salah satu upaya untuk membantu mengurangi kekerasan pada anak di kota pekanbaru”.

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh informan diatas dapat kita ketahui bahwa angka kekerasan seksual pada anak belum menurun dan kekerasan yang masih terjadi adalah kekerasan pada anak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih adanya kekerasan seksual pada anak khususnya di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. masih adanya kekerasan seksual pada anak yang dimana faktor utamanya yaitu kurangnya pengawasan orang tua dan edukasi oleh staf pengajar selaku pelaksana kegiatan perlindungan khusus anak.

b. Mampu Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak Secara Merata

Selanjutnya ditambahkan oleh ibu Dra. Ria Sri Kadarini sebagai kepala UPT PPA Kota Pekanbaru selaku informan menambahkan :

“menurut saya selaku kepala UPT PPA dalam pemerataan perlindungan khusus anak ini tentunya saya melihat dari sudut pandang pendidikan untuk memenuhi hak anak sudah dilaksanakan akan tetapi memang susah untuk merata secara merata karena masih banyaknya faktor faktor yang menjadi penghambat salah satunya masih meningkatnya angka kekerasan pada anak menurut saya jika masih terjadi hal seperti ini belum bisa dikatakan perlindungan khusus anak sudah merata”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa pemerataan perlindungan khusus anak belum merata secara sempurna karena banyak beberapa faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah masih meningkatnya kekerasan pada anak seperti yang disebutkan oleh informan diatas.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting yang memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sumber daya yang dimaksud diantaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu.

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Dilanjutkan oleh bapak Drs. Zamzami, M.Si Kepala bidang perlindungan khusus anak selaku informan melakukan wawancara pada 04 Maret 2024 mengatakan :

“Menurut saya untuk ketersediaan sumber daya manusia pada dinas pembelajaran perlindungan anak dan pembelajaran masyarakat sudah terlaksana dengan baik akan tetapi di bidang perlindungan khusus anak di kota pekanbaru saya merasakan masih kurang maksimalnya sumber daya manusia dan pembagian kerja ini berdasarkan kelengkapan di bidangnya masing masing, jadi rasa saya ketersediaan SDM disini masih kurang maksimal”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa keterlaksanaan sumber daya manusia di DP3APM sudah berjalan dengan baik dan sudah berdasarkan kelahirannya masing-masing, akan tetapi kendala terhadap keterlaksanaan sumber daya manusia di bidang perlindungan khusus anak di kota Pekanbaru Dinas pembelajaran perlindungan anak dan pembelajaran masyarakat belum maksimal.

b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Selanjutnya pernyataan dari ibu Dra. Ria Sri Kadarini sebagai kepala UPT PPA Kota Pekanbaru selaku keryilnforman menambahkan :

“Keterlaksanaan sarana dan prasarana khususnya di dinas melalui perlindungan khusus anak memang belum memenuhil kriteria sarana dan prasarana yang sesuai dengan sop karena untuk keterlaksanaan sarana dan perasaan masih ada beberapa yang kurang seperti tempat duduk buat tamu yang datang”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa untuk sarana dan prasarana dalam melaksanakan perlindungan khusus anak masih ada beberapa yang kurang dan itu menjadi salah satu kurangnya keterlaksanaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil Observasi terdapat kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang tampak jelas seperti tidak tersedia dengan lengkap tidak adanya tempat duduk buat tamu yang datang ingin melapor sehingga ini menjadi salah satu kurangnya optimalnya dalam pelaksanaan perlindungan khusus anak yang dimana dalam pemenuhan anak semua yang menjadi faktor pendukung baik dari sarana mau prasarana harus dipenuhi agar dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak berjalan optimal dan berdasarkan hasil observasi juga peneliti temukan bahwasanya sarana dan prasarana ini seharusnya disediakan oleh pihak dinas. Dan artinya dinas tidak mampu dalam mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana.

c. Ketersediaan Anggaran

Dalam hal ini kita perlu mengetahui anggaran Dinas pembelajaran perlindungan anak dan pembelajaran masyarakat dalam menyelenggarakan program perlindungan khusus anak melalui kegiatan perlindungan khusus anak, untuk mengetahui hal itu perlu adanya wawancara oleh pihak terkait di dinas pembelajaran perlindungan anak dan pembelajaran masyarakat yaitu oleh selketrans di dinas ibu Dina Septiana S.STP., M.Si sebagai keryilnforman pada 21 Februari 2024 melalui keterangan bahwa :

“Saya selaku selketrans di dinas DP3APM melihat anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait program perlindungan khusus anak memang sudah terlaksana akan tetapi sejauh ini mungkin ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, khususnya pada saat pandemi covid anggaran yang dilaksanakan memang tidak terlaksana karena memang beberapa kendala seperti covid maka dari itu anggaran yang tidak terpakai pada tahun sebelumnya akan dipergunakan pada tahun berikutnya”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa memang ada beberapa kendala dalam terlaksana anggaran yang ada salah satu faktornya yaitu ada masa

covid dan anggaran itu selindiril dapat kita lihat di laporan ketelrangan pertanggung jawaban tahun 2020 bahwasanya ada anggaran yang belum terlalilaksanakan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik Organisasi pelaksana merupakan badan-badan maupun instansi yang turut memiliki peran dalam suatu kebijakan, sikap dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Organisasi pelaksana sangat menentukan progres kebijakan dari kegiatan kegiatan yang dilaksanakan.

a. Tupoksi

Untuk mengetahui bagaimana terkait tupoksi pada dinas pembelajaran perlindungan anak dan masyarakat melalui wawancara lebih lanjut oleh Ibu Dina Septiani, S.STP, M.Si selaku key informan pada 21 Februari 2024 melalui pernyataan :

“Kalau bicara soal tupoksi untuk di dinas pembelajaran perlindungan anak dan masyarakat sudah sesuai dengan sebagai mestinya semua pegawai bekerja berdasarkan tupoksinya masing masing dan penempatan pegawai berdasarkan keahlian dan di pertanggung jawabkan oleh masing masing ASN dan pegawai yang ada di DP3APM”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa terkait tupoksi yang ada di dinas pembelajaran perlindungan anak dan masyarakat sudah sesuai dengan tupoksinya masing masing artinya tidak ada penyimpangan mengenai apa yang sudah ditugaskan dan apa yang harus di pertanggung jawabnya.

b. Berpartisipasi

Dilanjutkan pernyataan oleh bapak Drs. Zamzami, M.Si Kepala bidang perlindungan khusus anak selaku key informan melalui wawancara pada 04 Maret 2024 mengatakan :

“partisipasi dari dinas sendiri selaku pembuat kebijakan tentunya berpartisipasi dan ikut serta dalam pelaksanaannya karena kita juga sebagai pendorong berjalanya proram tersebut, dan bentuk partisipasi dari pihak dinas salah satunya mendukung pelaksanaan perlindungan khusus anak dan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan khusus anak seperti melakukan sosialisasi, monitoring dan pelatihan ini merupakan bagian dari keikutsertaan kami dari pihak dinas”.

Berdasarkan hasil observasi bahwasanya partisipasi dari berbagai pihak sudah ikut serta dalam pelaksanaan perlindungan khusus anak tersebut bahkan sampai ke masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan perlindungan khusus anak ini yang artinya semua pihak ikut berpartisipasi dan peduli dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak tersebut sehingga adanya saling membantu dalam pelaksanaannya.

c. Akuntabilitas

Selanjutnya dilanjutkan oleh Dillanjutkan pernyataan oleh bapak Drs. Zamzami, M.Si Kepala bidang perlindungan khusus anak selaku key informan pelnelliitil melakukan wawancara pada 04 Maret 2024 mengatakan :

“Menurut pandangan saya selaku kepala bidang melihat bahwa terkait akuntabilitas pegawai atau staf dinas ini sudah cukup baik jadi menurut saya tidak adanya permasalahan terkait akuntabilitas pegawai”.

Berdasarkan keterangan diatas dapat kita ketahui bahwasanya tidak adanya permasalahan terkait akuntabilitas pegawai artinya akuntabilitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sudah baik dan berdasarkan hasil wawancara bahwa adanya kesadaran pegawai terkait akuntabilitas dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil observasi akuntabilitas seorang pegawai di dinas sudah adanya kesadaran rasa tanggung jawab terhadap suatu tugas dan kewajibannya dan untuk organisasi pelaksana di dinas pun sudah adanya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang sudah dibebankan, dapat dilihat dari cara kerja staf dinas dan tanggung jawab staf dinas dalam pelaksanaan prosesnya.

4. Sikap Para Pelaksana

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana kesiapan kerja karyawan maka pelnelliitil melakukan wawancara oleh ibu Dina Septiana S. STP., M.Si selaku key informan pada 21 Februari 2024 menghasilkan pernyataan bahwa :

“terkait bagaimana sikap para pelaksana atau sikap para pegawai dalam menjalankan tugasnya itu sudah cukup baik, dan kami dari pihak dinas selaku pembuat kebijakan sekolah ramah anak ini sangat mendukung penuh dalam pelaksanaannya juga kami memfasilitasi dan staf pegawai disini juga merespon itu dengan baik, dapat dilihat dari bagaimana kesiapan kerja dan kecepatan kerja para pegawai dalam melaksanakan tugasnya, karena begitu ada perintah dari atasan maka staf pegawai yang terlibat langsung sigap dalam menjalankan tugas dan perintahnya”.

Berdasarkan hasil Observasi bahwasanya sikap para pelaksana dalam merespon kebijakan tersebut sangat antusias dan dilihat dari sikap para staf pegawai yang tanggap dalam merespon semua pekerjaan yang diberikan dan pihak dinas begitu sangat antusias dalam menjalankan kegiatan perlindungan khusus anak tersebut walaupun untuk terkait anggaran kurang memadai dan memfasilitasi di beberapa tahun terakhir ini.

5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana pelnelliitil melakukan wawancara oleh ibu Dra. Ria Sri Kadarini sebagai kepala UPT PPA Kota Pekanbaru selaku key informan pada 28 Februari 2024 menambahkan :

“Berdasarkan apa yang saya rasakan selama ini terkait komunikasi pihak dinas cukup baik, yang dimana pihak dinas memang betul selalu berkoordinasi dengan kami terkait kegiatan kegiatan seperti sosialisasi terkait perlindungan anak tersebut dan pihak dinas juga dalam menyampaikan pesan sudah cukup baik dan dalam pesan yang disampaikan juga kami respon baik”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bagaimana komunikasi antar organisasi khususnya bagaimana pesan yang disampaikan dari pihak dinas dengan pihak UPT PPA

sudah baik dan tidak ada permasalahan karena dari pihak dinas dan pihak UPT PPA itu sendiri juga selalu berkoordinasi terkait kegiatan yang melibatkan UPT PPA maupun dinas dan dari pihak UPT PPA juga sangat antusias dengan pesan yang disampaikan oleh dinas terlihat dari kinerja mereka.

6. Lingkungan Ekonomi dan Sosial

Selanjutnya dilanjutkan oleh ibu Dra. Ria Sri Kadarini sebagai kepala UPT PPA Kota Pekanbaru selaku kely ilnforman pada 28 Febuari 2024 melnambahkan :

“Saya selaku kepala UPT PPA dalam mengamati bagaimana kondisi eksternal terkait pelaksanaan perlindungan khusus anak tidak adanya kendala dan bahkan mendapatkan respon yang sangat baik yang terutama dari pihak eksternal serta dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak dengan inisiatif karena mereka selaku orang tua juga sadar bahwasanya adanay peran orang tua dalam pemenuhan hak anak dan dari segi kondisi ekonomi dan sosial juga cukup baik”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dapat kita ketahui bersama bagaimana kondisi lingkungan eksternal dalam mendukung pelaksanaan perlindungan khusus anak melalui kegiatan perlindungan khusus anak bahwasanya mendapatkan dukungan penuh dari lingkungan eksternal dan mendapatkan respon yang baik bahkan lingkungan eksternal ikut mendukung dalam pelaksanaan perlindungan khusus anak tersebut sepertiya mendapat dukungan berupa dana maupun sarana dan prasarana dengan sangat antusias dalam menyumbangkan tenaga maupun dana.

Kesimpulan

Belrdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang pelnellitil lakukan dapat dilsilmpulkan bahwa standar dan sasaran kelbiljakan sudah selsuail delngan jukrnils perlindungan khusus anak yang sudah dilteltapkan oleh DP3APM, akan teltapil melngelnail sumber daya manusia dalam mellaksanakan kelgilatan perlindungan khusus anak masilh kurang yang dilselbabkan oleh karaktelrilstilk organilsasil pellaksana kurang adanya pelrhatian lelbih telrkait pellaksanaan perlindungan anak telrselbut maka para silkap pellaksana dapat dilnillail kurang baik dalam meljalankan kelgilatan perlindungan khusus anak telrselbut juga dalam komunilkasil antar organilsasil bellum bisa dilanggap baik karelna adanya keltildakselsuailaan ilntruksil dan pelsan yang diltelrilma antar organilsasil ,dan masilh ada belberapa sarana dan prasarana yang kurang dalam melnunjang prosels pellaksanaan perlindungan khusus anak,dan Anggaran juga melnjadil faktor pelnghambat dalam mellaksanakan kelgilatan perlindungan khusus anak, dilkarelnakan telrbatasnya anggaran makan dilnas pelmbelrdayaan pelrelmpuan pelrlindungan anak dan pelmbelrdayaan masyarakat tildak dapat mellakukan sosialilsasil dil Pelkanbaru delngan iltu melnjadil pelrmasalahan dalam mellaksanakan kelgilatan perlindungan khusus anak dan tildak adanya tilm pelngawasan dalam kelgilatan perlindungan khusus anak telrselbut.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

Abdullah, M. 2014. Manajelmeln dan Elvaluasil Kilnelrja Karyawan. Yogyakarta : Pelnelrbilt Aswaja Prelssilndo.

- Dilmock, Marshal Eldward and Gladys Ogdeln Dilmock. Admilnilstrasil Nelgara. Diltelrjelmahkan oleh Husnil Thamriln Panel. Celtakan Kellilma. Rilnelka Cilpta. Jakarta 1982 Elrma Wildilana, M. (2020). Pelngantar Manajelmeln.
- Hungelr, J. Davild & Thomas L. Whelelleln. 2003. Manajelmeln Stratelgils. Yogyakarta, Andil.
- Robbins, S. P. (1990). Organization Theory : Structure, Design and Applicationsi Englewood Cliffs: Prentice-Hall International, Inc.
- Syafiie, I. K. (2010). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Syafiie, I. K. (2019). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riau, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.

- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.

- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Masyarakat Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.

- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis-Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.

- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model

- "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.